

Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Hijau, Peraturan Lingkungan, dan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Loso Judijanto¹, I Made Adi Suwandana²

¹IPOSS Jakarta

²Universitas Ngurah Rai

Info Artikel

Article history:

Received April, 2025

Revised April, 2025

Accepted April, 2025

Kata Kunci:

Kebijakan Ekonomi Hijau,
Regulasi Lingkungan,
Tanggung Jawab Korporat,
Keberlanjutan Bisnis

Keywords:

Green Economy Policy,
Environmental Regulation,
Corporate Responsibility,
Business Sustainability

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan tanggung jawab korporasi terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mensurvei 150 perusahaan dan menganalisis data menggunakan Structural Equation Modeling dengan Partial Least Squares (SEM-PLS 3). Temuan menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap keberlanjutan bisnis. Secara spesifik, kebijakan ekonomi hijau mendorong praktik bisnis berkelanjutan dengan memberikan insentif untuk strategi ramah lingkungan, sementara regulasi lingkungan yang ketat mendorong keberlanjutan yang didorong oleh kepatuhan. Selain itu, tanggung jawab korporat, yang mencakup praktik etis dan keterlibatan komunitas, memainkan peran krusial dalam meningkatkan keberlanjutan bisnis. Hasil penelitian menyoroti pentingnya bagi bisnis untuk mengadopsi strategi keberlanjutan yang komprehensif yang selaras dengan kebijakan pemerintah, persyaratan regulasi, dan tanggung jawab sosial korporat. Studi ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan peneliti, mendorong pendekatan yang lebih terintegrasi terhadap keberlanjutan di sektor bisnis.

ABSTRACT

This study examines the impact of green economy policies, environmental regulations, and corporate responsibility on business sustainability in Indonesia. With a quantitative approach, this study surveyed 150 companies and analyzed data using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS 3). The findings show that these three factors have a significant and positive impact on business sustainability. Specifically, green economy policies encourage sustainable business practices by providing incentives for eco-friendly strategies, while strict environmental regulations encourage compliance-driven sustainability. Additionally, corporate responsibility, which includes ethical practices and community engagement, plays a crucial role in improving business sustainability. The results highlight the importance for businesses to adopt a comprehensive sustainability strategy that aligns with government policies, regulatory requirements, and corporate social responsibility. The study provides important implications for policymakers, business leaders, and researchers, driving a more integrated approach to sustainability in the business sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto
Institution: IPOSS Jakarta
Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya keberlanjutan dalam operasional bisnis telah meningkat secara signifikan, didorong oleh tekanan eksternal dan motivasi internal. Di Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan beragam industri, kebutuhan bagi bisnis untuk mengadopsi praktik berkelanjutan semakin jelas. Kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan inisiatif tanggung jawab korporat semakin membentuk lanskap bisnis, mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan tetapi juga pada dampak lingkungan dan sosial. Seiring dengan meningkatnya tantangan lingkungan seperti polusi, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim, bisnis diharapkan memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. The increasing importance of sustainability in business operations in Indonesia is driven by both external pressures and internal motivations. Sebagai ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan seperti polusi, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim, yang mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Perusahaan semakin menyadari kebutuhan untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasional mereka, tidak hanya untuk mematuhi regulasi lingkungan tetapi juga untuk meningkatkan reputasi korporat dan kinerja keuangan.

Pergeseran ini didukung oleh kebijakan pemerintah, inisiatif kewarganegaraan korporat, dan fokus strategis pada keberlanjutan oleh perusahaan di berbagai sektor. Kewarganegaraan korporat (Corporate Citizenship/CC) sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, karena mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan selain mencari keuntungan. Praktik CC telah terbukti memiliki dampak positif pada kinerja bisnis, keterlibatan karyawan, dan keberlanjutan, menjadikannya investasi strategis bagi perusahaan (Hakim & Asfiah, 2024). Kebijakan pemerintah yang mendukung praktik CC semakin mempercepat pencapaian SDGs, dengan perusahaan aktif berpartisipasi dalam inisiatif seperti pengentasan kemiskinan dan aksi iklim (Hakim & Asfiah, 2024). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia juga memainkan peran penting dalam inovasi berkelanjutan. UMKM yang bersertifikat B Corp di Indonesia menunjukkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan (Singgih & Famiola, 2025). Praktik ini membantu menyeimbangkan pengejaran keuntungan dengan pertimbangan lingkungan, mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia (Singgih & Famiola, 2025). Selain itu, upaya regulasi Indonesia pasca-Suharto berfokus pada kewajiban keberlanjutan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mencerminkan komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan (Sheehy & Damayanti, 2019). Kerangka hukum ini mendukung perusahaan dalam mengadopsi praktik berkelanjutan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan (Sheehy & Damayanti, 2019). Bagian-bagian berikut akan mengeksplorasi aspek-aspek ini secara rinci.

Kebijakan ekonomi hijau merujuk pada strategi pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dalam industri, termasuk insentif untuk adopsi teknologi bersih, solusi energi terbarukan, dan metode produksi berkelanjutan. Regulasi lingkungan merupakan bagian penting dari kebijakan ini, berupa aturan dan standar yang ditetapkan oleh badan regulasi untuk memastikan perusahaan mematuhi kriteria kinerja lingkungan tertentu, seperti pengendalian emisi berbahaya, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Tanggung jawab korporat, sebagai komponen pelengkap, mencakup praktik tenaga kerja etis, pengembangan komunitas, dan pengelolaan lingkungan, yang secara keseluruhan menegaskan peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan strategis kebijakan ekonomi hijau bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan melalui promosi teknologi bersih, energi terbarukan, dan metode produksi ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

Transisi menuju ekonomi hijau didukung oleh kebijakan seperti insentif finansial dan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi tantangan lingkungan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Aspek kunci dari kebijakan ini antara lain adalah promosi energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seperti investasi dalam tenaga surya, angin, dan hidroelektrik yang krusial untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca (Rodiyah et al., 2023; Wahida & Uyun, 2023). Pemberian insentif bagi teknologi bersih dan praktik berkelanjutan, seperti subsidi dan dukungan bagi pertanian ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya, menjadi strategi penting (Rodiyah et al., 2023; Singh, 2023; 2024, سعد). Selain itu, penciptaan lapangan kerja hijau membuka peluang ekonomi baru di sektor industri berkelanjutan, yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta mengurangi biaya lingkungan jangka panjang (Harris, 2023; Rodiyah et al., 2023; Singh, 2023; 2024, سعد).

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sektor industri yang sedang berkembang, menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Sebagai anggota komunitas global, negara ini telah berkomitmen pada berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas komitmen ini sangat bergantung pada adopsi dan implementasi kebijakan hijau yang kuat, peraturan lingkungan yang ketat, serta budaya korporat yang mengutamakan keberlanjutan. Tantangan yang bersifat multifaset ini mencakup implementasi pajak karbon yang bertujuan menyelaraskan kebijakan lingkungan dengan ketahanan ekonomi industri, meskipun masyarakat menilai efektivitasnya masih moderat dan menyoroti isu transparansi serta dampak ekonominya (Herlucky & Laudia, 2024). Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini mencakup pengembangan insentif industri, pelaksanaan evaluasi berkala, serta peningkatan partisipasi publik (Herlucky & Laudia, 2024).

Selain itu, adopsi Kerangka Pertumbuhan Hijau (Green Growth Framework/GGF) oleh Indonesia menunjukkan integrasi antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dengan dampak signifikan pada pendalaman keuangan dan hasil pembangunan berkelanjutan (Diartho, 2023). Agar strategi ini berhasil dalam jangka panjang, diperlukan penyesuaian kebijakan dan upaya berkelanjutan, yang juga dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya (Diartho, 2023). Dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menekankan pentingnya energi terbarukan seperti geothermal, hidroelektrik, dan surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, disertai fokus pada pembangunan perkotaan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (Arifin et al., 2024). Namun, tantangan seperti ketimpangan sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, dan koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan utama, yang memerlukan tata kelola efektif dan partisipasi masyarakat luas (Fitri et al., 2020). Di sisi lain, pengalaman Indonesia dalam menghadapi booming sumber daya alam menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya secara hati-hati untuk menghindari "kutukan sumber daya," di mana

transisi menuju ekonomi rendah karbon baru memasuki tahap awal dan sangat memerlukan pemeliharaan hutan, laut, serta sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan (Hill & Pasaribu, 2024).

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan tanggung jawab korporasi terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia. Secara spesifik, makalah ini berupaya menyelidiki bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kelangsungan bisnis jangka panjang di negara ini. Mengingat keberlanjutan merupakan konsep yang multifaset, mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, penting untuk memahami bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dalam membentuk praktik bisnis dan hasilnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan Bisnis

Kebijakan ekonomi hijau merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, bertujuan untuk mengatasi tantangan ekologi sambil mendorong pembangunan. Di Indonesia, kebijakan semacam ini telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, terutama melalui insentif energi terbarukan. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada penegakan yang kuat dan regulasi yang jelas, karena perusahaan membutuhkan dukungan terstruktur untuk transisi berkelanjutan. Elemen kunci meliputi promosi energi terbarukan untuk mengurangi emisi dan menciptakan lapangan kerja hijau (Rodiyah et al., 2023; Wahida & Uyun, 2023), investasi dalam infrastruktur berkelanjutan seperti transportasi ramah lingkungan dan bangunan hemat energi (Rodiyah et al., 2023), serta penerapan kebijakan fiskal seperti pajak karbon dan subsidi teknologi hijau (Harris, 2023; Lambin & Lambin, 2014). Tantangan meliputi kebutuhan akan keselarasan kebijakan antar sektor (Rodiyah et al., 2023), keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif (Rodiyah et al., 2023), dan kerja sama internasional untuk berbagi praktik terbaik serta menyediakan dukungan finansial dan teknis (Harris, 2023; Rodiyah et al., 2023).

2.2 Regulasi Lingkungan dan Keberlanjutan Bisnis

Regulasi lingkungan adalah kerangka hukum yang memastikan bisnis mematuhi standar lingkungan, mencakup pengendalian polusi, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya. Di Indonesia, regulasi ini penting untuk mengatasi degradasi lingkungan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Studi menunjukkan bahwa regulasi ketat dapat mendorong inovasi dan efisiensi melalui adopsi teknologi bersih (Demko-Rihter et al., 2023; J. Gao et al., 2023), namun juga dapat membebani UKM dengan biaya kepatuhan yang tinggi (F. Gao et al., 2024). Pemerintah Indonesia telah memperketat regulasi di sektor pertambangan, manufaktur, dan energi melalui kebijakan seperti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan dan RAN Mitigasi Perubahan Iklim. Meski begitu, lemahnya penegakan hukum masih menjadi tantangan (Lukman et al., 2020; Narotama et al., 2023). Perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan regulasi cenderung meraih efisiensi dan mengurangi risiko lingkungan (Dahlan, 2018).

2.3 Tanggung Jawab Korporat dan Keberlanjutan Bisnis

Tanggung jawab korporasi (CR) adalah komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi pada tujuan sosial dan lingkungan di luar pencapaian keuntungan, seperti praktik tenaga kerja adil, pengembangan komunitas, dan pengurangan dampak lingkungan. CR semakin penting karena perusahaan dinilai tidak hanya dari kinerja finansial, tetapi juga kontribusi sosial-lingkungannya. Studi menunjukkan bahwa CR berhubungan positif dengan keberlanjutan bisnis; perusahaan yang menerapkan prinsip Triple Bottom Line cenderung lebih sukses (Elkington, 1997) dan menunjukkan kinerja keuangan serta loyalitas merek yang lebih baik (Ciubotariu et al., 2022; Lukman et al., 2020; Wentzel et al., 2023). Di Indonesia, perusahaan seperti Unilever dan Danone menunjukkan bahwa integrasi CR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, meskipun

UMKM masih menghadapi tantangan dalam penerapannya karena keterbatasan sumber daya dan kesadaran.

2.4 Kesenjangan Penelitian dan Hipotesis

Meskipun penelitian existing telah menyoroiti dampak individu dari kebijakan ekonomi hijau, peraturan lingkungan, dan tanggung jawab korporat terhadap keberlanjutan bisnis, bukti empiris tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi hasil keberlanjutan di Indonesia masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengisi celah ini dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut dan dampak kolektifnya terhadap keberlanjutan bisnis.

Berdasarkan literatur yang ditinjau, hipotesis berikut diajukan:

H1: Kebijakan ekonomi hijau secara positif mempengaruhi keberlanjutan bisnis di Indonesia.

H2: Regulasi lingkungan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia.

H3: Tanggung jawab korporasi memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia.

H4: Kebijakan ekonomi hijau memiliki dampak positif terhadap tanggung jawab korporasi di Indonesia.

H5: Regulasi lingkungan memiliki dampak positif terhadap tanggung jawab korporasi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-korelatif untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antara variabel menggunakan data numerik. Desain ini memungkinkan pengukuran dampak kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan tanggung jawab korporat terhadap keberlanjutan bisnis secara objektif dan dapat digeneralisasi. Studi ini bersifat cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu untuk menggambarkan kondisi saat ini dan interrelasi antar variabel. Populasi penelitian mencakup perusahaan di berbagai sektor di Indonesia, seperti manufaktur, jasa, pertanian, dan ritel, dengan sampel sebanyak 150 perusahaan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik keberlanjutan. Kriteria inklusi meliputi operasional di Indonesia, keterlibatan dalam aktivitas berdampak lingkungan, serta familiaritas dengan praktik keberlanjutan. Data dikumpulkan melalui survei berbasis kuesioner yang ditujukan kepada manajer atau pengambil keputusan utama di perusahaan, dan disebarluaskan secara elektronik. Kuesioner mengukur empat konstruk utama: kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, tanggung jawab korporat, dan keberlanjutan bisnis, menggunakan skala Likert 1–5.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), yang dipilih karena kemampuannya menganalisis model kompleks dengan banyak konstruk dan cocok untuk sampel kecil hingga menengah. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: penyaringan dan persiapan data (termasuk penanganan data hilang dan outlier), evaluasi model pengukuran (meliputi validitas konvergen dengan AVE, validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker, serta keandalan dengan Cronbach's alpha dan Composite Reliability), dan evaluasi model struktural (melalui koefisien jalur, nilai R-squared, dan uji signifikansi dengan bootstrapping, di mana hipotesis diterima jika t-statistik > 1.96). Terakhir, kesesuaian model secara keseluruhan diuji menggunakan Goodness of Fit (GoF) dan indeks lainnya untuk memastikan model mewakili data secara memadai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sampel Demografis

Ciri-ciri demografis sampel memberikan konteks penting untuk memahami keragaman bisnis dalam hal jenis industri, ukuran, lama beroperasi, dan pengalaman dalam implementasi praktik keberlanjutan. Sampel terdiri dari 150 bisnis yang mencakup berbagai sektor industri, dengan distribusi sebagai berikut: manufaktur (30%), pertanian (23%), ritel (20%), jasa (13%), konstruksi (7%), dan lainnya seperti teknologi, transportasi, dan kesehatan (7%). Sektor manufaktur

dan pertanian mendominasi, mencerminkan relevansi sektor ini dalam isu keberlanjutan. Dari sisi ukuran, bisnis kecil (1–50 karyawan) dan menengah (51–250 karyawan) masing-masing mewakili 40% sampel, sementara perusahaan besar (251+ karyawan) mencakup 20%, menyoroti bahwa UKM merupakan kelompok dominan yang mungkin lebih sensitif terhadap tantangan biaya keberlanjutan. Lama beroperasi juga bervariasi: 27% telah beroperasi selama 1–5 tahun, 33% selama 6–10 tahun, 27% selama 11–20 tahun, dan 13% selama lebih dari 20 tahun, dengan proporsi terbesar berasal dari kelompok 6–10 tahun yang kemungkinan telah mengalami berbagai transisi regulasi dan ekonomi. Dalam hal pengalaman menerapkan praktik keberlanjutan, 13% bisnis tidak memiliki pengalaman, 33% memiliki pengalaman terbatas, 33% pengalaman moderat, dan 20% pengalaman luas. Mayoritas responden (66%) memiliki keterlibatan dalam praktik keberlanjutan, mencerminkan bahwa sampel ini cukup representatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan tanggung jawab korporat terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia.

4.2 Model Pengukuran

Model pengukuran menggambarkan hubungan antara variabel laten (konstruk) dan indikator teramati (item) yang terkait dalam penelitian ini. Pada bagian ini, kami akan membahas model pengukuran untuk variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian: Kebijakan Ekonomi Hijau (Green Economic Policy), Peraturan Lingkungan (Environmental Regulations), Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Responsibility), dan Keberlanjutan Bisnis (Business Sustainability). Untuk setiap variabel, kami akan menyajikan beban faktor, Cronbach's Alpha (CA), Composite Reliability (CR), dan Average Variance Extracted (AVE).

Tabel 1. Model Pengukuran

Variable	Code	Loading Factor	CA	CR	AVE
Kebijakan Ekonomi Hijau	EH.1	0.881	0.866	0.904	0.654
	EH.2	0.939			
	EH.3	0.928			
Peraturan Lingkungan	PL.1	0.719	0.856	0.904	0.702
	PL.2	0.865			
	PL.3	0.895			
	PL.4	0.862			
Tanggung Jawab Perusahaan	TJP.1	0.858	0.857	0.913	0.779
	TJP.2	0.934			
	TJP.3	0.853			
Keberlanjutan Bisnis	KB.1	0.798	0.866	0.904	0.654
	KB.2	0.810			
	KB.3	0.793			
	KB.4	0.890			
	KB.5	0.839			

Analisis model pengukuran menunjukkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas yang baik. Untuk konstruk Kebijakan Ekonomi Hijau, tiga indikator (EH.1 = 0.881, EH.2 = 0.939, EH.3 = 0.928) menunjukkan faktor beban tinggi, dengan Cronbach's Alpha (CA) sebesar 0.866, Composite Reliability (CR) sebesar 0.904, dan Average Variance Extracted (AVE) sebesar 0.654, yang semuanya melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Konstruk Peraturan Lingkungan juga menunjukkan performa yang kuat,

dengan empat indikator (PL.1 = 0.719, PL.2 = 0.865, PL.3 = 0.895, PL.4 = 0.862), CA sebesar 0.856, CR sebesar 0.904, dan AVE sebesar 0.702. Konstruk Tanggung Jawab Perusahaan terdiri dari tiga indikator (TJP.1 = 0.858, TJP.2 = 0.934, TJP.3 = 0.853) yang juga menunjukkan validitas konvergen yang tinggi, dengan CA sebesar 0.857, CR sebesar 0.913, dan AVE sebesar 0.779. Terakhir, konstruk Keberlanjutan Bisnis memiliki lima indikator (KB.1 = 0.798, KB.2 = 0.810, KB.3 = 0.793, KB.4 = 0.890, KB.5 = 0.839), dengan CA sebesar 0.866, CR sebesar 0.904, dan AVE sebesar 0.654. Semua nilai tersebut menunjukkan bahwa konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas dan validitas konvergen yang sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran mampu merepresentasikan masing-masing variabel laten secara akurat dan konsisten.

Validitas diskriminatif mengacu pada sejauh mana suatu konstruk dalam model berbeda secara jelas dari konstruk lainnya, memastikan bahwa setiap konstruk mengukur aspek yang unik dan tidak tumpang tindih secara berlebihan. Untuk menilai validitas ini, studi ini menggunakan Kriteria Fornell-Larcker, yang membandingkan akar kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk. Validitas diskriminatif dianggap memadai apabila akar kuadrat AVE suatu konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasinya terhadap konstruk lain. Dalam studi ini, hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria tersebut terpenuhi, sehingga masing-masing konstruk dalam model dapat dikatakan memiliki validitas diskriminatif yang baik.

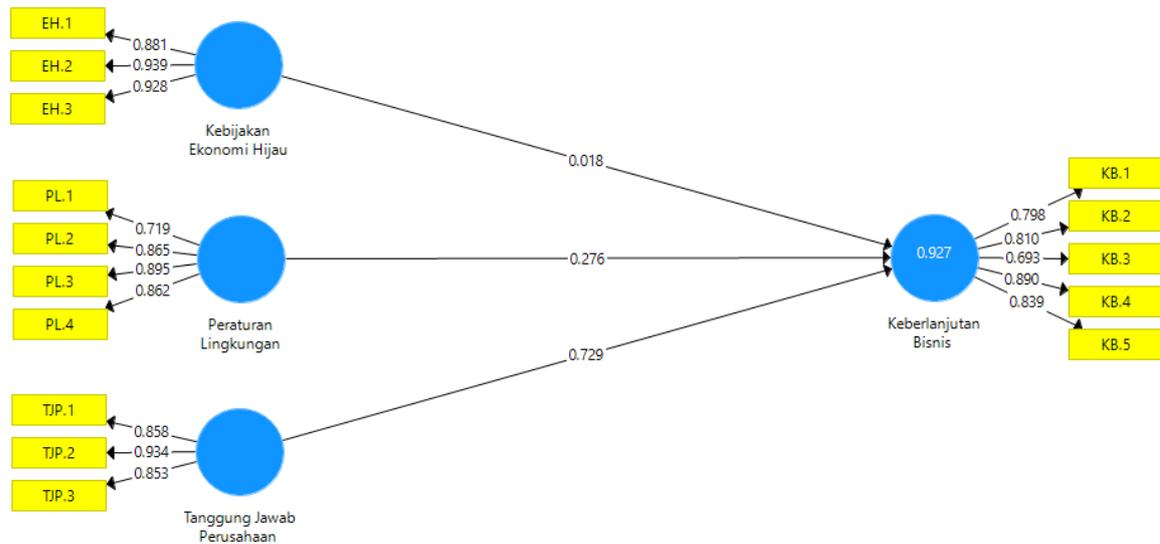
Tabel 2. Validitas Diskriminan

	Keberlanjutan Bisnis	Kebijakan Ekonomi Hijau	Peraturan Lingkungan	Tanggung Jawab Perusahaan
Keberlanjutan Bisnis	0.808			
Kebijakan Ekonomi Hijau	0.834	0.817		
Peraturan Lingkungan	0.815	0.711	0.838	
Tanggung Jawab Perusahaan	0.843	0.851	0.722	0.882

Validitas diskriminatif dinilai melalui perbandingan antara akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk. Hasil menunjukkan bahwa Keberlanjutan Bisnis (AVE $\sqrt{}$ = 0.808) dan Kebijakan Ekonomi Hijau (AVE $\sqrt{}$ = 0.817) memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk lain, seperti Tanggung Jawab Perusahaan (0.843 dan 0.851), menunjukkan potensi tumpang tindih dan kurangnya keunikan konstruk. Sebaliknya, Peraturan Lingkungan (AVE $\sqrt{}$ = 0.838) dan Tanggung Jawab Perusahaan (AVE $\sqrt{}$ = 0.882) menunjukkan validitas diskriminatif yang memadai karena nilai AVE mereka lebih besar dari semua korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun sebagian konstruk menunjukkan pemisahan yang jelas, beberapa konstruk masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menghindari overlap konseptual.

Dalam Model Persamaan Struktural (SEM), R Square (R^2) mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi pada variabel dependen, sementara Adjusted R^2 memberikan estimasi yang lebih akurat dengan memperhitungkan jumlah prediktor. Dalam studi ini, Keberlanjutan Bisnis sebagai variabel dependen memiliki nilai R^2 sebesar 0.527 dan Adjusted R^2 sebesar 0.525. Nilai R^2 sebesar 0.527 menunjukkan bahwa Kebijakan Ekonomi Hijau, Peraturan Lingkungan, dan Tanggung Jawab Perusahaan secara kolektif menjelaskan 52.7% variasi dalam keberlanjutan bisnis, yang tergolong moderat dalam konteks ilmu sosial. Ini menunjukkan bahwa model memiliki daya penjelas yang cukup baik, meskipun masih ada faktor lain di luar model yang turut memengaruhi keberlanjutan bisnis. Nilai Adjusted R^2 yang hampir sama, yakni 0.525, menandakan bahwa model ini tidak overfitted dan ketiga prediktor yang digunakan memberikan kontribusi yang relevan dalam menjelaskan varians variabel dependen. Perbedaan yang sangat kecil

antara R^2 dan Adjusted R^2 memperkuat bahwa model ini robust dan efisien dalam menjelaskan keberlanjutan bisnis tanpa memasukkan variabel yang tidak signifikan.



Gambar 1. Hasil Pengukuran

4.3 Uji Hipotesis

Dalam analisis SEM-PLS, uji hipotesis digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan arah hubungan antara konstruk melalui analisis koefisien jalur serta signifikansi statistiknya, yang dinilai menggunakan T-statistik dan nilai P. Hubungan dianggap signifikan secara statistik jika T-statistik melebihi 1,96 dan nilai P kurang dari 0,05. Dalam studi ini, uji hipotesis dilakukan untuk menilai pengaruh tiga variabel independen—Kebijakan Ekonomi Hijau, Peraturan Lingkungan, dan Tanggung Jawab Perusahaan—terhadap variabel dependen yaitu Keberlanjutan Bisnis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dan sejauh mana masing-masing faktor memengaruhi keberlanjutan bisnis secara signifikan dalam konteks model penelitian yang dikembangkan.

Tabel 3. Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kebijakan Ekonomi Hijau -> Keberlanjutan Bisnis	0.218	0.222	0.055	2.316	0.004
Peraturan Lingkungan -> Keberlanjutan Bisnis	0.276	0.273	0.053	5.211	0.000
Tanggung Jawab Perusahaan -> Keberlanjutan Bisnis	0.729	0.727	0.053	13.673	0.000

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ketiga konstruk independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Keberlanjutan Bisnis. Hipotesis 1, yang menguji pengaruh Kebijakan Ekonomi Hijau terhadap Keberlanjutan Bisnis, menunjukkan koefisien jalur sebesar 0.218 dengan T-statistic 2.316 dan P-value 0.004, mengindikasikan hubungan positif yang signifikan; artinya, semakin kuat kebijakan ekonomi hijau, semakin tinggi tingkat keberlanjutan bisnis. Hipotesis 2, yang menilai pengaruh Peraturan Lingkungan terhadap Keberlanjutan Bisnis, menghasilkan koefisien jalur sebesar 0.276, T-statistic 5.211, dan P-value 0.000, menunjukkan bahwa peraturan lingkungan yang lebih ketat secara signifikan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, Hipotesis 3 memperlihatkan bahwa Tanggung Jawab Perusahaan memiliki pengaruh paling kuat, dengan koefisien jalur 0.729, T-statistic 13.673, dan P-value 0.000, menandakan bahwa praktik tanggung jawab korporat yang tinggi sangat berkontribusi pada keberlanjutan bisnis. Ketiga hipotesis ini

secara statistik signifikan dan didukung oleh data, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan berperan penting dalam mendorong keberlanjutan bisnis di Indonesia.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Kebijakan Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan Bisnis

Hipotesis pertama menguji hubungan antara Kebijakan Ekonomi Hijau (Green Economic Policy) dan Keberlanjutan Bisnis (Business Sustainability). Koefisien jalur positif dan signifikan (0.218) dengan T-statistic 2.316 dan nilai P 0.004 menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi hijau memang berpengaruh dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menekankan peran kebijakan pemerintah dalam mempromosikan keberlanjutan. Misalnya, kebijakan ekonomi hijau, seperti insentif pajak, subsidi untuk adopsi energi terbarukan, dan kerangka regulasi yang mendorong perlindungan lingkungan, telah terbukti mendorong bisnis menuju praktik yang lebih berkelanjutan (Lee & Hussain, 2022; Wang et al., 2023).

Kebijakan ekonomi hijau tidak hanya mendorong bisnis untuk mengurangi jejak karbon mereka tetapi juga menyelaraskan tujuan korporasi dengan agenda keberlanjutan nasional. Temuan ini konsisten dengan konsep corporate environmentalism, di mana bisnis mengadopsi praktik ramah lingkungan tidak hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing mereka (Hu et al., 2021). Dengan menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan lingkungan, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan citra merek mereka tetapi juga meraih manfaat finansial jangka panjang dengan mengurangi biaya energi dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

4.4.2 Peraturan Lingkungan dan Keberlanjutan Bisnis

Hipotesis kedua mengeksplorasi dampak Peraturan Lingkungan (Environmental Regulations) terhadap Keberlanjutan Bisnis (Business Sustainability). Dengan koefisien jalur 0,276, nilai T 5,211, dan nilai P 0,000, hasil ini secara kuat mendukung gagasan bahwa peraturan lingkungan yang ketat berkontribusi pada tingkat keberlanjutan bisnis yang lebih tinggi. Hal ini konsisten dengan pendekatan keberlanjutan yang didorong oleh kepatuhan, di mana perusahaan terpaksa mengadopsi praktik berkelanjutan karena adanya persyaratan hukum dan regulasi (Demko-Rihter et al., 2023; Makridou et al., 2023; Respati et al., 2023).

Regulasi lingkungan, termasuk batas emisi, pedoman pengelolaan limbah, dan persyaratan konservasi sumber daya, memaksa perusahaan untuk berinovasi dan mengadopsi proses yang lebih berkelanjutan. Regulasi ini mungkin awalnya menimbulkan biaya kepatuhan bagi bisnis, tetapi dalam jangka panjang, mereka mendorong efisiensi, inovasi teknologi, dan pengurangan liabilitas lingkungan. Selain itu, bisnis yang mematuhi regulasi lingkungan dapat menghindari denda yang mahal, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat reputasi mereka di mata konsumen dan investor yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan.

4.4.3 Tanggung Jawab Perusahaan dan Keberlanjutan Bisnis

Hipotesis ketiga menguji dampak Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Responsibility) terhadap Keberlanjutan Bisnis (Business Sustainability). Hubungan positif yang sangat kuat yang diamati (koefisien jalur 0,729, T-statistic 13,673, dan P-value 0,000) menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab perusahaan merupakan faktor utama yang mendorong keberlanjutan bisnis di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori Triple Bottom Line (TBL), yang menekankan bahwa bisnis harus fokus pada hasil sosial, lingkungan, dan ekonomi (Elkington, 1997).

Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti program pengembangan komunitas, praktik tenaga kerja etis, dan manajemen rantai pasok yang berkelanjutan, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga menguntungkan bisnis dengan membangun kepercayaan, loyalitas, dan nilai merek. Hubungan yang kuat antara CSR dan keberlanjutan bisnis dalam studi ini mencerminkan pentingnya perilaku bertanggung jawab secara sosial dalam lanskap bisnis modern. Perusahaan yang mengadopsi praktik CSR dapat membedakan diri mereka di pasar yang kompetitif, menarik konsumen yang peduli lingkungan, dan meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang mereka (Ciubotariu et al., 2022; Lukman et al., 2020; Wentzel et al., 2023).

4.4.4 Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik

Hasil studi ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan peneliti. Bagi pembuat kebijakan, temuan menekankan perlunya memperkuat kebijakan ekonomi hijau dan regulasi lingkungan untuk mendorong keberlanjutan bisnis melalui insentif energi terbarukan, pengurangan limbah, dan penegakan aturan yang konsisten. Bagi pelaku bisnis, pentingnya tanggung jawab korporat menunjukkan bahwa integrasi keberlanjutan ke dalam strategi operasional—seperti rantai pasok berkelanjutan dan etika bisnis—dapat meningkatkan kinerja dan dampak sosial-lingkungan.

Bagi peneliti, studi ini membuka peluang eksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara kebijakan, strategi perusahaan, dan keberlanjutan. Penelitian ke depan dapat membahas efektivitas kebijakan ekonomi hijau di berbagai sektor, membandingkan CSR sukarela dan berbasis regulasi, serta menilai peran pelaporan keberlanjutan dalam membangun reputasi bisnis.

4.4.5 Batasan dan Arah Penelitian Masa Depan

Meskipun studi ini memberikan wawasan berharga, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Sampel sebanyak 150 perusahaan mungkin belum mewakili seluruh keragaman industri dan ukuran bisnis di Indonesia, sehingga studi lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak sektor, termasuk UKM. Selain itu, fokus geografis pada Indonesia membuat hasil studi ini kurang dapat digeneralisasi ke negara lain; penelitian komparatif lintas negara diperlukan untuk memperoleh perspektif global.

Studi ini juga menggunakan desain cross-sectional, yang hanya menangkap kondisi pada satu waktu tertentu. Untuk memahami dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan tanggung jawab korporat terhadap keberlanjutan bisnis, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan longitudinal guna melihat perubahan dan efektivitas kebijakan secara lebih mendalam dari waktu ke waktu.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran penting kebijakan ekonomi hijau, regulasi lingkungan, dan tanggung jawab korporat dalam mendorong keberlanjutan bisnis di Indonesia. Temuan studi menunjukkan bahwa bisnis yang selaras dengan kebijakan ekonomi hijau dan mematuhi regulasi lingkungan lebih siap untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, inisiatif tanggung jawab korporat, seperti praktik etis dan keterlibatan komunitas, semakin memperkuat keberlanjutan bisnis dengan membangun kepercayaan dan loyalitas di antara pemangku kepentingan. Temuan ini menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan holistik terhadap keberlanjutan, di mana perusahaan tidak hanya mematuhi standar regulasi tetapi juga secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan sosial. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini menyarankan agar terus mempromosikan kebijakan hijau dan regulasi lingkungan yang kuat untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktik berkelanjutan. Bagi pemimpin bisnis, studi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam inti operasional mereka untuk meningkatkan daya saing dan memastikan kesuksesan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., Masyhar, A., Sumardiana, B., Ramada, D. P., Kamal, U., & Fikri, S. (2024). Indonesian sustainable development policy: How the government ensures the environment for future generations. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1355(1), 12005.
- Ciubotariu, M., Sandulachi, A.-M., Grosu, V., Hlaciuc, E., & Macovei, A. (2022). The Effects of CSR Policies in Maintaining the Sustainability of SMEs in Times of Crisis. *Global Conference on Business and Social Sciences Proceeding*, 14, 1. [https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.2\(68\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.2(68))
- Dahlan, M. (2018). The Effect of Management Accounting Systems on Company Performance, External Environmental Uncertainty as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management*, 1(01), 55–66.

- Demko-Rihter, J., Sassanelli, C., Pantelic, M., & Anisic, Z. (2023). A Framework to Assess Manufacturers' Circular Economy Readiness Level in Developing Countries: An Application Case in a Serbian Packaging Company. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086982>
- Diartho, H. C. (2023). Alternative Strategies for Economic Sustainability and Increased Environmental Protection in Indonesia Incorporate the Green Growth Framework and Financial Deepening. *Society*, 11(2), 697–714.
- Elkington, J. (1997). The triple bottom line. *Environmental Management: Readings and Cases*, 2, 49–66.
- Fitri, I., Marisa, A., & Sitorus, R. (2020). Heritage conservation roadmap for the historic city of Medan, Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 801(1), 12031.
- Gao, F., Nketiah, E., & Shi, V. (2024). Understanding and Enhancing Food Conservation Behaviors and Operations. *Sustainability (Switzerland)*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/su16072898>
- Gao, J., Xu, N., & Zhou, J. (2023). Does Digital Transformation Contribute to Corporate Carbon Emissions Reduction? Empirical Evidence from China. *Sustainability (Switzerland)*, 15(18), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su151813414>
- Hakim, A. R., & Asfiah, N. (2024). Driving sustainability in Indonesia: the importance of corporate citizenship in realizing sustainable development goals. *Mednarodno Inovativno Poslovanje= Journal of Innovative Business and Management*, 16(2), 1–16.
- Harris, J. M. (2023). Green economy. In *Elgar Encyclopedia of Ecological Economics* (pp. 284–288). Edward Elgar Publishing.
- Herlucky, J. F. A., & Laudia, L. A. (2024). Dilema Penerapan Pajak Karbon di Indonesia: Antara Komitmen Lingkungan dan Ketahanan Ekonomi Industri. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1189–1195.
- Hill, H., & Pasaribu, D. (2024). Indonesia and the resource curse: economic and environmental dimensions. In *The Indonesian Economy and the Surrounding Regions in the 21st Century: Essays in Honor of Iwan Jaya Azis* (pp. 65–96). Springer.
- Hu, S., Zeng, G., Cao, X., Yuan, H., & Chen, B. (2021). Does technological innovation promote green development? A case study of the Yangtze River Economic Belt in China. *International Journal of ...*
- Lambin, J.-J., & Lambin, J.-J. (2014). A Green Economy. *Rethinking the Market Economy: New Challenges, New Ideas, New Opportunities*, 59–85.
- Lee, C. C., & Hussain, J. (2022). Carbon neutral sustainability and green development during energy consumption. In *Innovation and Green Development*. Elsevier.
- Lukman, H., Suhendah, R., & Evan, J. (2020). *Analysis Corporate Social Responsibility and Environmental Performance Report Forward Financial Performance on Proper Ranking Companies in Indonesia*.
- Makridou, G., Doumpos, M., & Lemonakis, C. (2023). Relationship between ESG and corporate financial performance in the energy sector: empirical evidence from European companies. *International Journal of Energy Sector Management, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJESM-01-2023-0012>
- Narotama, B., Achsani, N. A., & Santoso, M. H. (2023). Corporate Environmental, Social, and Governance (ESG) and SMEs' Value (a Lesson From Indonesian Public SMEs). *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE)*, 9(2), 197.
- Respati, B. W., Ihwanudin, M., & Kurniawati, M. (2023). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Keseimbangan Kehidupan Kerja Terhadap Performa Karyawan: Peran Mediasi Kepuasan Kerja. *Jurnal Manajerial*, 10(02), 179. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v10i02.5363>
- Rodiyah, R., Arifin, R., Wulansarie, R., Baiquni, M. I., & Zainurohmah, Z. (2023). Capturing the Opportunity of Green Economic Policy for Environmental Sustainability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1), 12035.
- Sheehy, B., & Damayanti, C. (2019). Sustainability and legislated corporate social responsibility in Indonesia. *Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability (Cambridge University Press, Forthcoming), University of Oslo Faculty of Law Research Paper*, 2019–38.
- Singgih, G. G., & Famiola, M. (2025). Core Values of Sustainable Innovation in Indonesian SMEs. In *Core Values and Decision-Making for Sustainable Business: An International Perspective* (pp. 39–74). Springer Nature Switzerland Cham.
- Singh, A. (2023). Green economic policies, strategies & initiatives of India. *EAI Endorsed Transactions on Energy Web*, 10(1).
- Wahida, K., & Uyun, H. (2023). Tatanan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui green economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 14–26.

- Wang, X., Song, X., & Sun, M. (2023). How Does a Company's ESG Performance Affect the Issuance of an Audit Opinion? The Moderating Role of Auditor Experience. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph20053878>
- Wentzel, L., Fapohunda, J. A., & Haldenwang, R. (2023). A Corporate Social Responsibility (CSR) Model to Achieve Sustainable Business Performance (SBP) of SMEs in the South African Construction Industry. *Sustainability*, 15(13), 10007.
- (الاقتصاد الأخضر كحل لتحقيق التنمية المستدامة). 2024. (سعاد). *Scientific Journal of King Faisal University, Humanities & Management Sciences*, 25(1).